BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Sistem pemilu dilaksanakan sesuai asas Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil). Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan dengan aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Komisi Pemilihan Umum adalah salah satu instansi pemerintahan yang bersifat *independen nonpartisan* atau instansi pemerintah yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak lainnya. Secara institusional, Komisi Pemilihan Umum sebenarnya telah dibentuk melalui keputusan Presiden (Keppres) No 16 Tahun 1999, tepatnya pada tanggal 19 Februari 1999 Keppres ini, sekaligus mengakhiri masa kerja Lembaga Pemilihan Umum (LPU) sebagai

penyelenggara Pemilu. Sementara Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemilu yang bebas dan mandiri. Untuk menunjang kegiatan Komisi Pemilihan Umum, dibentuk Sekretariat Umum. Sekretariat Umum adalah sebuah badan pemerintahan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada pemerintah.

Sebelum adanya *Website* KPU. KPU Provinsi Jawa Barat mensosialisasikan pemilu dengan cara mendatangi langsung daerah-daerah yang akan melaksanakan Pemilu dengan bantuan personel dari KPU Kabupaten/Kota serta dengan bantuan dari warga yang ada di daerah pemilihan. Hal itu dilakukan melalui perintah dari KPU Pusat yang disebarkan informasi tentang pemilu kepada KPU Provinsi dan akhirnya informasi tentang Pemilu itu di sebarluaskan ke setiap daerah yang di tugaskan kepada KPU Kabupaten/Kota di sertai dengan petugas dari KPU Provinsi Jawa Barat.

Seiring semakin berkembangnya dunia teknologi informasi maka Komisi Pemilihan Umum mempunyai cara untuk mensosialisasikan Pemilu kepada masyarakat luas yaitu salah satunya dengan cara penyebaran informasi tentang Pemilu melalui media *Website* yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat yang ingin mengetahui informasi apa saja yang terkait dengan Pemilu baik itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Pada saat ini *Website* yang di kelola oleh Komisi Pemilihan Umum masih belum menunjukan kinerja yang efektif hal ini dapat dilihat dari masih kurang *update* nya setiap informasi tentang Pemilu, hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat yang mengetahui calon Kepala Daerah yang akan mereka pilih nantinya.

Jumlah partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 adalah sebanyak 44 partai yang terdiri dari partai-partai yang memang sudah lebih dahulu terbentuk dan lebih dahulu memiliki pengalaman di bidang politik, maupun partai yang baru terbentuk.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan sebuah penelitian yang di susun sebagai karya ilmiah dengan judul sebagai berikut:

"**Tingkat Efektifitas Penggunaan Media *Website* Oleh KPU Provinsi Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Pemilu 2009 Kepada Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi)".**

1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah

Di dalam identifikasi dan perumusan masalah berguna untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian.

1.2.1.Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sering terjadinya keterlambatan dalam memperbaharui informasi tentang pemilu
2. Masih kurang lengkapnya informasi tentang partai-partai dan nama bakal calon anggota legislatif yang ada di pemilu 2009
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang isi yang terdapat dalam *website* KPU

1.2.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *website* KPU saat ini
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap efektifitas dalam mensosialisasikan pemilu
3. Bagaimana pengaruh *website* KPU terhadap efektifitas sosialisasi pemilu

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan penelitian berguna untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian selain itu berguna juga untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan.

1.3.1.Maksud penelitian

Maksud diadakan penelitian yang dilakukan penulis lakukan di KPU Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat efektifitas penggunaan media *website* oleh KPU Provinsi jawa Barat dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat.

1.3.2.Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui website KPU saat ini
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap efektifitas dalam mensosialisasikan pemilu
3. Untuk mengetahui pengaruh website KPU terhadap efektifitas sosialisasi pemilu

1.4.Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan kegunaan-kegunaan yang bermanfaat diantaranya kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

1.4.1.Kegunaan Praktis

Bagi KPU Provinsi jawa Barat dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu atau dapat meningkatkan kinerja para pegawai sehingga dalam pemberian informasi tentang tata cara sosialisasi pemilu kepada masyarakat melalui media *website* menjadi lebih efektif.

1.4.2.Kegunaan Akademis

Untuk pengembangan ilmu dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya terutama yang akan meneliti masalah yang berkaitan dengan efektifitas website KPU dalam mensosialisasikan pemilu.

Bagi penulis/peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman dan bertambahnya keilmuan dan dapat mengaplikasikannya di lapangan.

1.5.Batasan masalah

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan masalah dan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Tempat penelitian dilakukan pada KPU Provinsi Jawa barat
2. Responden hanya untuk wilayah Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya. Dan responden hanya untuk yang sudah pernah mengakses *website* KPU.

1.6.Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka pemikiran berguna sebagai landasan teoritis yang berasal dari pendapat para ahli maupun berasal dari teori pustaka yang telah teruji kebenarannya, sementara hipotesis berguna untuk memberikan kesimpulan sementara atau kesimpulan awal.

1.6.1.Kerangka Pemikiran

Sebagai landasan teoritis untuk menyusun kerangka pemikiran, penulis mengacu pada dalil-dalil serta pendapat dari para ahli yang telah teruji

kebenarannya. Dalam membahas permasalahan yang diteliti dibawah ini, penulis uraikan sebagai berikut :

Bagaikan berlomba dengan proses penyusunan undang-undang yang dilakukan DPR, banyak tokoh mengambil ancang-ancang mendirikan partai politik untuk bisa berlaga di pemilu. Karena berkehendak besar agar partai yang didirikan bisa lolos mengikuti pemilu, maka para pendiri partai politik baru ini secara aktif ikut memberikan tekanan politik dan masukan pada DPR yang sedang membahas RUU politik, dengan harapan substansi UU yang baru tidak mempersulit keikutsertaan partai politik yang baru dalam pemilu.

Menurut IR. AGUNG MULYANA, MSC (2008:10)

Dari sisi lembaga atau organisasi yang melakukan sosialisasi Pemilu, terkait dengan kerangka umum Pendidikan Pemilih, dapat dibagi sebagai berikut:

1. ***Pertama***, peserta Pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif partai politik (DPR dan DPRD), calon anggota DPD dan pasangan calon presiden dan wakil presiden berikut partai politik yang mengusungnya.
2. ***Kedua***, penyelenggara Pemilu, baik KPU atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), secara organisatoris dari pusat sampai kecamatan dan tempat pemungutan suara.
3. ***Ketiga***, pemerintah, baik pusat atau daerah, terutama yang berkaitan dengan pendataan pemilih. KPU hanya *user* atau pengguna dari data pemilih yang dilakukan oleh pemerintah.

4. ***Keempat***, organisasi kemasyarakat (ormas) yang mempunyai basis massa, baik berdasarkan keanggotaan aktif atau karena pengaruh pengelompokan berdasarkan keturunan. Dalam kategori ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah ormas, berikut organisasi pendukung lain dalam masing-masing organisasi seperti Aisyiyah dan Muslimat NU.
5. ***Kelima***, organisasi masyarakat sipil (OMS) atau lembaga swadaya masyarakat. OMS ini bisa terbagi lagi kedalam kategori OMS yang berafiliasi dengan pemerintah (OMS plat merah), berafiliasi dengan organisasi massa, OMS yang mempunyai spesifikasi khusus di bidang Pemilu (atau politik dan pemerintahan dalam arti lebih luas), serta OMS yang tidak sepesifik mengerjakan soal-soal Pemilu. Dalam kategori ini, terdapat Jaringan Islam Liberal, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan OMS di daerah.
6. ***Keenam***, media massa. Dalam kategori lama, media massa termasuk bagian dari masyarakat sipil dalam mengisi *public sphere* atau *public discourse*. Tetapi, seiring dengan semakin solidnya konsolidasi demokrasi, media massa juga dikategorikan sebagai perusahaan privat. Karena hubungan kepemilikan dan ketergantungan kepada iklan, media massa bisa mendapatkan program Pendidikan Pemilih dari pemerintah, peserta Pemilu / Pilkada, *funding agency*, atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dana yang memadai.

Karena itu, program Pendidikan Pemilih lebih mengandalkan media televisi, radio dan koran, sebagaimana dilakukan oleh Jaringan Islam Liberal

(JIL). JIL mengaku sebagai satu-satunya yang melakukan program televisi menyangkut Pendidikan Pemilih, sekalipun juga diketahui bahwa ada banyak dialog atau talkshow di televisi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil lain, seperti Koalisi Media untuk Pemilu atau C for VICI (Consorcium for Voter information Campaign in Indonesia). Di lingkungan organisasi massa, seperti Aisyiyah, program Pendidikan Pemilih menggunakan sarana pengajian yang dilakukan oleh organisasi, serta cara-cara lain dengan metode ceramah para pimpinan Muhammadiyah.

Sementara di kalangan KPU dan KPUD, sosialisasi Pemilu lebih bersifat prosedural dengan cara membuat tayangan di televisi, radio dan media cetak. Ada semacam rubrik tanya jawab Pemilu juga di media, termasuk via website KPU (www.kpu.go.id) yang bisa diakses lewat internet. Valina Sinka Subekti, anggota KPU, menjadi ikon dalam sosialisasi pemilihan atau penyoblosan itu. Di tingkat daerah, cara sosialisasi yang ditempuh oleh KPU Ternate bersifat konvensional, yakni dialog interaktif. Materinya lebih berupa teknis penyoblosan. Sasaran utama sosialisasi ini adalah pemilih pemula. Apa yang disampaikan KPUD itu sama dengan yang disampaikan oleh pihak pengelola radio dan akademisi Ternate. Yang agak berbeda adalah cara “Bacarito Kampuang” yang dilakukan oleh kalangan akademisi dengan penduduk pedesaan di Sumatera Barat. Menariknya lagi, bagi para penyelenggaan kegiatan itu, upaya sosialisasi Pemilu lebih terkait dengan kekhawatiran jumlah golput meningkat.

Dengan berjalannya waktu, para pemilih terpaksa menggunakan media apa saja menyangkut Pemilu. Tentu informasi yang paling banyak diperoleh dari media massa, terutama televisi, radio dan koran. Informasi lain juga berupa sosialisasi di poster, spanduk, baliho, sampai sosialisasi oleh peserta Pemilu. Hanya saja, dari sisi pemberitaan, lebih banyak yang muncul adalah *news* alias pemberitaan seputar kompetisi para peserta Pemilu itu sendiri, ketimbang pemberian informasi bagi kalangan pemilih. Sehingga, untuk jangka panjang, diperlukan Pendidikan Pemilih yang lebih baik dan bersifat antisipatif, agar pemilih tidak lagi dijadikan sebagai sasaran kesalahan.

Menurut Roger S. Pressman (2002:215)

Secara prinsip sebuah software dikatakan baik apabila dapat secara utuh dan sempurna memenuhi kriteria spesifik dari organisasi perusahaan yang membutuhkan. Hal ini sering diistilahkan sebagai pemenuhan terhadap "*user requirement"* (kebutuhan pengguna software yang telah terlebih dahulu didefinisikan secara jelas dan detail). Variable yang menentukan kualitas suatu *software* sistem informasi berdasarkan dimensi operasionalnya yaitu:

1. Kepuasan: Sejauh mana suatu software memenuhi spesifikasi dan mission objective dari user.
2. Kesempurnaan: Sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melaksanakan fungsinya dengan ketelitian yang diperlukan.
3. Kecepatan: Sejauh mana software berbasis web dapat selalu menyajikan informasi terbaru

4. Kemudahan: Usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan input, dan mengartikan output dari software
5. Mobilitas data: Data pada suatu isi (content) sebuah software berbasis web harus selalu menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna serta keakuratan dari penyajian tersebut. Ditinjau dari sisi mobolitas nya.

Menurut Peraturan KPU No.23 Tahun 2008

Metode Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi: komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training of trainneer/facilitator, ceramah maupun simulasi. Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audio visual. Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

Media Dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi:

a. Media utama: media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik: TV, radio, CD rom, slide, internet, warnet, call center (above the line).
b. Media pendukung: poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, folder, booklet (below the line).
c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing, seperti:
    1. Ketoprak, ludruk, wayang kulit
    2. Publikasi dalam bahasa daerah
    3. Posko informasi Pilkada
    4. Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu
    5. Dan lain-lain

Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, LSM, Ormas, Stasiun TV, Radio maupun media massa cetak.

Adapun strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bersifat:

a. Terpadu dan Sistematis.
b. Menggunakan materi above dan below the line.
c. Penggalangan kemitraan.

d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.

Menurut Jack Febrian (2002:52)

Kemampuan internet boleh dikatakan tidak terbatas, dan bagiannya pun tidak sedikit. Termasuk didalamnya penggunaan *e-mail*, *usenet news groups*, proses *transfer file* ataupun informasi, dan benar-benar luar biasa kemampuannya. Semua itu diistilahkan dengan *world Wide Web.* Halaman web biasanya di desain semenarik mungkin oleh pembuatnya. Pada halaman tersebut bisa ditampilkan bermacam-macam informasi yang diinginkan. Bahkan menariknya, pada halaman tersebut dapat diselipkan gambar, suara, dan pemutaran cuplikan video.

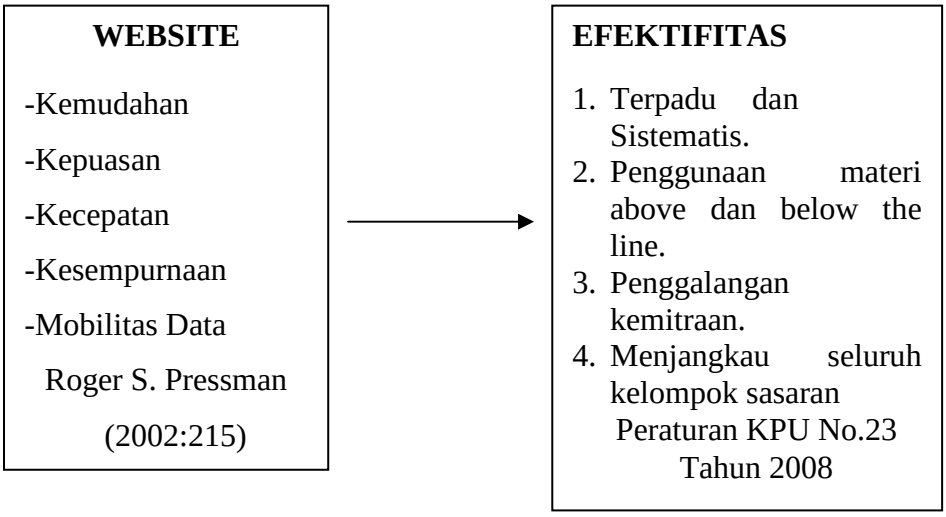
Halaman web tersebut dihubungkan melalui *hyperlink*, sehingga dengan hanaya menklik *hyperlink* tersebut, secara otomatis dapat menghubungkan penggunanya dengan halaman web lainnya. Jutaan halaman web ini tersedia di internet, yang meliputi ratusan, atau bahkan ribuan topik jenis informasi yang disediakan.

Kini internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar interface pada layanan-layanan yang ada di internet, dari awalnya sebagai penyedia informasi, kini digunakan juga untuk komunikasi dari *e-mail* sampai dengan *chatting*, sampai dengan melakukan transaksi bisnis (*commerce*)

Paradigma penelitian adalah merupakan pola fikir yang menunjukan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka

penelitian yang merumuskan paradigma adalah penelitian yang bersifat asosiatif.

Dengan paradigma penelitian itu, maka akan dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan masalah penelitian, merumuskan hipotesis dan menentukan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.(DR.Sugiyono 2004:5)



Gambar 1.1:Paradigma Penelitian

1.6.2.Hipotesis

Untuk mengetahui jawaban terhadap masalah penelitian diperlukan Hipotesis. Hipotesis itu sendiri merupakan dugaan, asumsi atau kesimpulan sementara yang diajukan oleh seorang peneliti terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan pengertian hipotesis secara umum yaitu jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan) dan kesimpulannya bersifat sementara.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu hipotesis

H0 : Artinya, tidak ada pengaruh antara *website* KPU (variabel X) terhadap Efektifitas Sosialisasi Pemilu (variabel Y).

H1 : Artinya, terdapat pengaruh antara *website* KPU (variabel X) terhadap Efektifitas Sosialisasi Pemilu (variabel Y).

1.7.Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Februari 2009 yang bertempat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat yang berada di JL.Garut no.11 Bandung. Adapun jadwal pembuatan laporan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Jadwal dan Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal																				
2.	Perencanaan Penelitian																				
3.	Pembuatan Kuisioner																				
4.	Penyebaran Kuisioner																				
5.	Penginputan Data																				
6.	Pengolahan Data																				
7.	Pembuatan Laporan																				